

IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SPEKTRUM SMK PADA PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Azany Muzammil Masany
Amat Mukhadis
Tri Atmadji Sutikno

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kurikulum spektrum SMK pada pengelolaan pembelajaran produktif dan hambatan-hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan multi situs. Hasil penelitian menunjukkan: (1) perencanaan pembelajaran meliputi pembentukan tim kurikulum, penyusunan SK/KD, pelibatan DU/DI, penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran meliputi pembagian SK/KD, pembelajaran di DU/DI, dan *project work*; penilaian pembelajaran berupa penilaian tertulis, lisan, dan praktik; (2) hambatan yang terjadi berupa minimnya guru tetap berkualifikasi S1 pendidikan komputer, inkonsistensi guru, dan minimnya sarana prasarana.

Kata-kata kunci: implementasi, kurikulum, spektrum

Abstract: *The Implementation of Education Unit Level Curriculum of SMK Spectrum in Study Program of Computer Engineering and Information Technology. This study aims to describe the implementation of SMK spectrum curriculum on organizing productive learning and the encountered obstacles. The research uses a qualitative approach using a multi-site design. The results show: (1) the planning of productive learning includes assigning curriculum team, SK/KD arrangement, involvement of DU/DI, RPP arrangement, the implementation of productive learning consists of grouping SK/KD, learning process in DU/DI, and of project work; the learning assessments are written assessment, interview, and practical; (2) the obstacles are small number of qualified teacher, inconsistency teachers, and lack of facilities.*

Keywords: *implementation, curriculum, spectrum*

Kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi isu yang sering dibicarakan pada saat ini, bukan karena adanya peningkatan melainkan dianggap tidak mampu bersaing karena kualitasnya yang masih rendah. Sementara kualitas sumber daya manusia dipengaruhi salah

satunya oleh kualitas pendidikan. Menurut hasil survei *The United Nations Development Program (UNDP)* yang dirilis pada bulan Nopember 2011 bahwa Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) Indonesia menempati urutan ke-124 dari 187 negara di dunia.

Azany Muzammil Masany adalah alumni Pendidikan Kejuruan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Amat Mukhadis dan Tri Atmadji Sutikno adalah Dosen Pendidikan Kejuruan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Kampus Jalan Semarang 5 Malang 65145.

Demikianhalnya dengan laporan *International Institute for Development (IID)* yang menempatkan Indonesia pada posisi terakhir dalam sistem pendidikan, yakni peringkat ke-49 di antara 49 negara. Sementara itu, berdasarkan data pada *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan *UNESCO* pada bulan Maret 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-69 dari 127 negara yang disurvei. Peringkat Indonesia ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2010, di mana Indonesia berada di urutan ke-65.

Sanjaya (2012: 9), memaparkan bahwa sekolah didirikan untuk membimbing peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini berarti titik sentral kurikulum adalah anak didik itu sendiri. Perkembangan anak didik hanya akan tercapai apabila dia memperoleh pengalaman belajar melalui semua kegiatan yang disajikan sekolah, baik melalui mata pelajaran atau pun kegiatan lainnya. Oleh karena itu seperti yang dikatakan Zeis (dalam Sanjaya, 2012: 9), kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran harus bermuara pada perolehan pengalaman peserat didik yang sengaja dirancang untuk mereka miliki. Dengan demikian, kurikulum mencakup dua sisi yang penting, yaitu perencanaan pembelajaran serta bagaimana perencanaan itu diimplementasikan menjadi pengalaman belajar siswa dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan.

Sukmadinata (dalam Susilo, 2007: 9), mengemukakan bahwa kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan, dengan kata lain bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa memegang peranan penting dalam suatu sistem pen-

didikan. Maka kurikulum sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan harus mampu mengantarkan anak didik menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berbudi luhur, berilmu, bermoral, tidak hanya sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus diberikan kepada murid, melainkan sebagai aktifitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami, diterima, dan dilakukan. Hal ini juga berlaku bagi pendidikan kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Arti pendidikan kejuruan ini dijabarkan secara spesifik lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yaitu Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu. Prinsip dasarnya adalah pendidikan kejuruan harus dapat mengembangkan potensi individu peserta didik secara optimal sehingga memiliki kecakapan hidup agar mampu mempertahankan hidupnya. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Keputusan Mendikbud No. 0490/U/1990, diantaranya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian, serta menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. Sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan sekolah menengah kejuruan tersebut maka diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/Kep/Mn/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Spektrum SMK.

Kurikulum Spektrum SMK yang diterapkan di masing-masing SMK akan dapat diimplementasikan dengan optimal apabila mulai dari awal proses penyusunannya sampai dengan penerapan langsung berupa kegiatan belajar mengajar merupakan sinergi beberapa komponen yang berperan didalamnya, utamanya adalah peranan dari guru. Bagaimanapun juga, kurikulum sebagai perencanaan merupakan rumusan ideal (potensial) yang mengandung arti dan bermakna serta berdaya guna apabila telah diimplementasikan oleh guru secara baik dan benar. Implementasi dalam wujud kegiatan nyata yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan kata lain, kurikulum dan guru adalah dua komponen penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan di sekolah.

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Kurikulum Spektrum SMK dituntut kemampuan guru untuk menganalisis dan menjabarkan SK/KD ke dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kebijakan ini tidak hanya memposisikan guru sebagai implementator kurikulum tetapi juga menjadi pengembang (*developer*) kurikulum pada tingkat satuan pendidikan termasuk jenjang SMK. Pemberlakuan Kurikulum Spektrum SMK pada mata pelajaran produktif, memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada guru untuk mengembangkan dan melaksanakannya, sehingga peserta didik dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan pada akhirnya peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penelitian ini difokuskan pada implementasi Kurikulum Spektrum SMK pada pengelolaan pembelajaran produktif Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika pada SMK di Kabupaten

Lombok Timur dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi Kurikulum Spektrum SMK beserta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Implementasi kurikulum meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak, antara lain: (1) peneliti, untuk memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan tentang implementasi Kurikulum Spektrum SMK, (2) kepala sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan Kurikulum Spektrum di sekolah, (3) guru, dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berarti dalam pengelolaan pembelajaran, dan (4) Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah, sebagai bahan referensi dalam mengambil kebijakan implementasi Kurikulum Spektrum, sehingga dapat meningkatkan kualitas SMK negeri dan swasta terutama dari segi pengelolaan pembelajaran.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan multi situs, karena penelitian ini dilakukan di dua lokasi penelitian yang berbeda namun memiliki persamaan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada dua SMK yang ada di Kabupaten Lombok Timur, yakni SMK Bumi Selaparang dan SMK Bumi Pringga. Pertimbangan pemilihan kedua sekolah ini didasari pada beberapa hal diantaranya: (1) telah menerapkan KTSP Spektrum 2008 sejak Tahun Ajaran 2008/2009, (2) memiliki tiga dari empat kompetensi keahlian pada Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, (3) merupakan sekolah yang paling diminati oleh lulusan siswa SMP/MTs untuk melanjutkan studi, (4) memiliki sa-

rana prasarana paling memadai dibandingkan SMK lainnya, dan (5) proses penerapan sistem manajemen mutu berbasis *ISO 9001:2008*. Rancangan penelitian ini mengikuti tiga tahapan yang disarankan Moleong (2010: 127) yaitu: (1) tahap pra-lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data. Adapun yang menjadi acuan dalam rancangan penelitian ini untuk menggali data dari fokus penelitian tentang implementasi Kurikulum Spektrum pada dua SMK di Kabupaten Lombok Timur disajikan pada Tabel 1.

dan SMK Bumi Pringga (BP), maka dapat disusun proposisi lintas situs sesuai fokus dan sub fokus penelitian, yaitu: implementasi Kurikulum Spektrum pada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di SMK BS dapat dipaparkan sebagai berikut (1) kepala sekolah membentuk tim pokja kurikulum yang beranggotakan kepala sekolah, waka kurikulum, kaprodi, guru kejuruan dan DU/DI untuk merencanakan, menyusun dan mereview Kurikulum Spektrum setiap satu tahun sekali; (2) Musyawarah Guru Mata

Tabel 1. Rancangan Acuan Pengumpulan Data

Fokus/Subfokus Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Profil Sekolah	Kepsek, Kaprodi, TU	Wawancara, dokumen studi dokumentasi
Implementasi kurikulum spektrum pada pengelolaan pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran)	Kepala sekolah, Waka, Kaprodi, Guru Produktif	Wawancara, observasi, studi dokumentasi
Faktor penghambat implementasi kurikulum Spektrum	Kepsek, Waka, Kaprodi, Guru Produktif	Wawancara, observasi, studi dokumentasi
Upaya mengatasi hambatan implementasi kurikulum Spektrum	Kepsek, Waka, Kaprodi, Guru Produktif	Wawancara, observasi, studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut diorganisir, ditafsir dan dianalisis secara berulang-ulang, baik melalui analisis dalam situs maupun analisis lintas situs guna menemukan proposisi temuan penelitian. Kredibilitas data dicek dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan diskusi teman sejawat, sedangkan dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan oleh para pembimbing sebagai *dependent auditor*.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian lintas situs pada SMK Bumi Selaparang (BS)

Pelajaran (MGMP) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyusun silabus mata pelajaran produktif berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada di Kurikulum Spektrum; (3) guru produktif mereview dan menyusun silabus di tingkat sekolah berdasarkan kondisi sekolah; dan (4) guru produktif menyusun RPP dan perangkat administrasi pembelajaran lainnya pada kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Sementara itu, perencanaan pembelajaran SMK BP: (1) waka kurikulum dan kaprodi membuat *draft* kurikulum; (2) kepala sekolah membentuk tim kurikulum yang beranggotakan waka kurikulum, kaprodi dan 2 orang guru kejuruan untuk mereview dan menyusun Kurikulum Spektrum setiap satu tahun

sekali; (3) guru produktif mereview dan menyusun silabus di tingkat sekolah berdasarkan kondisi sekolah; dan (4) guru produktif menyusun RPP dan perangkat administrasi pembelajaran lainnya pada kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali.

Implementasi Kurikulum Spektrum pada pelaksanaan pembelajaran produktif. Formulasi temuan penelitian dari kedua situs sebagai berikut: Pelaksanaan pembelajaran produktif pada SMK BS: (1) sebagian besar SK/KD pada mata pelajaran produktif diberikan pada siswa kelas X; (2) Praktek Kerja Industri (Prakerin) dilaksanakan ketika siswa menempuh Kelas XI Semester Genap; dan (3) pemberian tugas akhir atau *projectwork* ketika siswa menempuh Kelas XII Semester Ganjil. Pelaksanaan pembelajaran produktif pada SMK BP: (1) pelajaran produktif tidak diberikan kepada saat siswa Kelas X Semester Ganjil, tetapi diganti dengan mata pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI); (2) pelajaran produktif baru diberikan pada saat siswa Kelas X Semester Genap sampai dengan Kelas XII Semester Genap; (3) pembagian SK/KD sebesar 25,00% pada setiap semester; dan (4) Prakerin dilaksanakan ketika siswa menempuh Kelas XI Semester Genap.

Implementasi Kurikulum Spektrum pada penilaian pembelajaran produktif dipaparkan sebagai berikut. Formulasi temuan penelitian dari kedua situs adalah: (1) Penilaian pembelajaran SMK BS lebih ditekankan pada aspek penilaian praktik (proyek, produk maupun unjuk kerja); (2) penilaian dilaksanakan pada setiap akhir standar kompetensi; (3) kriteria siswa dikatakan kompeten atau lulus apabila memenuhi nilai minimal sama dengan 7; dan (4) bentuk penilaian terhadap siswa berupa ulangan harian, tengah semester, akhir semester dan kenaikan kelas. Penilaian pembelajaran SMK BP meliputi: (1) penilaian berupa penilaian tertulis,

lisan dan praktik (proyek, produk, maupun unjuk kerja); (2) penilaian dilaksanakan pada setiap akhir standar kompetensi; (3) kriteria siswa dikatakan kompeten atau lulus apabila memenuhi nilai minimal sama dengan 7; dan (4) bentuk penilaian terhadap siswa berupa ulangan harian, tengah semester, akhir semester dan kenaikan kelas.

Formulasi temuan penelitian tentang hambatan implementasi Kurikulum Spektrum dari kedua situs adalah sebagai berikut. Hambatan-hambatan pada SMK BS meliputi: (1) minimnya atau terbatasnya tenaga pendidik (guru) yang berstatus tetap/pegawai negeri sipil (PNS) dan mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jurusan komputer; (2) belum konsistennya pendidik/guru dari segi waktu penyelesaian perangkat pembelajaran; dan (3) terbatasnya sarana prasarana untuk kebutuhan praktik siswa. Hambatan-hambatan pada implementasi Kurikulum Spektrum SMK BP meliputi: (1) minimnya atau terbatasnya tenaga pendidik (guru) yang berstatus tetap/PNS dan mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jurusan komputer; (2) belum konsistennya pendidik/guru dari segi waktu penyelesaian perangkat pembelajaran; (3) terbatasnya dana untuk pengadaan sarana prasarana praktik siswa; dan (4) sering terjadinya pemadaman listrik pada waktu jam belajar praktik.

Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Kurikulum Spektrum di SMK BS adalah: (1) mengusulkan kepada pihak pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk mengangkat tenaga pendidik (guru) yang berkualifikasi sarjana pendidikan komputer melalui jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD); (2) mengangkat tenaga pendidik (guru) honorer yang berkualifikasi pendidikan komputer oleh pihak sekolah; (3) mengadakan kegiatan bimbingan teknis atau *workshop* secara rutin dan berkala untuk mengurangi inkonsistensi

tenaga pendidik dalam menyelesaikan perangkat pembelajaran; (4) mengefektifkan penggunaan sumber dana yang masuk ke sekolah, baik bersumber dari komite sekolah maupun dari pemerintah pusat/daerah serta menerapkan skala prioritas dalam pengadaan sarana prasarana sesuai dengan tingkat kebutuhan; dan (5) menjalin kerjasama dengan DU/DI untuk pengadaan sarana prasarana praktik siswa, disamping secara rutin mengirimkan proposal ke pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Upaya-upaya mengatasi hambatan pada implementasi Kurikulum Spektrum SMK BP meliputi: (1) mengusulkan kepada pihak pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk mengangkat tenaga pendidik (guru) yang berkualifikasi sarjana pendidikan komputer melalui jalur penerimaan CPNSD; (2) mengangkat tenaga pendidik (guru) honorer yang berkualifikasi pendidikan komputer oleh pihak sekolah; (3) meningkatkan *skill* dan kompetensi tenaga pendidik dengan mengikutsertakan tenaga pendidik pada diklat-diklat yang diadakan oleh P4TK (VEDC) Malang; (4) mengadakan bimbingan teknis atau *workshop* secara rutin dan berkala untuk mengurangi inkonsistensi tenaga pendidik dalam menyelesaikan perangkat pembelajaran; (5) mengefektifkan penggunaan dana yang masuk ke sekolah, baik bersumber dari komite sekolah maupun dari pemerintah pusat/daerah serta menerapkan skala prioritas dalam pengadaan sarana prasarana sesuai dengan tingkat kebutuhan; dan (6) mengirimkan proposal secara rutin ke pemerintah pusat untuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana.

PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Spektrum pada Perencanaan Pembelajaran Produktif

Guru memegang peranan yang sangat penting baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaan kurikulum di setiap tingkat satuan pendidikan. Sebagai perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum, guru berusaha menerjemahkan, mengelola, dan meramu kurikulum untuk disajikan di dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium/bengkel, serta melakukan penilaian dan perbaikan/penyempurnaan terhadap kurikulum. Sebagai pelaksana kurikulum yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan proses belajar mengajar, seorang guru yang memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan dalam mengajar, mampu menciptakan situasi belajar yang aktif, mengarahkan, penuh kesungguhan dan mampu mendorong kreatifitas peserta didik.

Dengan mengkaji perbandingan antara kelompok kasus substantif, di mana substantif menjadi penghubung yang strategis dalam memfokuskan dan menyusun teori formal berdasarkan pada data, maka penelitian ini ditelaah berdasarkan data temuan tentang perencanaan pembelajaran produktif di SMK. Dalam konteks proses perencanaan pembelajaran produktif ditemukan fakta bahwa di dua situs, yaitu SMK Bumi Selaparang dan SMK Bumi Pringga, melaksanakan hal-hal berikut ini. *Pertama*, pembentukan tim pengembang atau pokja kurikulum oleh kepala sekolah. Langkah awal yang dilakukan oleh kepala sekolah pada kedua situs tersebut adalah membentuk panitia atau tim kurikulum yang beranggotakan waka kurikulum, kaprodi dan guru-guru produktif dari masing-masing kompetensi keahlian untuk menyusun, *mereview* dan membuat kurikulum yang akan dijadikan pedoman atau acuan oleh guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tim pengembang kurikulum yang dibentuk oleh kepala sekolah ini melaksanakan tugas setiap tahun sekali atau setiap menjelang tahun pelajaran baru. Penyusunan silabus mata pelajaran produktif dilakukan di tingkat MGMP dan satuan pendidikan. *Kedua*, Proses perencanaan pembelajaran dilaku-

kan melalui penyusunan dan review silabus di tingkat MGMP dan satuan pendidikan. Proses penyusunan silabus dan RPP dilaksanakan minimal setiap enam bulan sekali pada level MGMP kabupaten, selanjutnya silabus tersebut direview ulang pada tingkat satuan pendidikan/sekolah terutama oleh kaprodi dan guru pada program studi keahlian. *Review* ulang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi real yang ada di masing-masing sekolah, baik dari segi kompetensi guru maupun sarana prasarana yang ada. Dengan demikian silabus yang sudah *direview* pada tingkat satuan pendidikan akan semakin memudahkan guru dalam membuat RPP yang nantinya akan diaplikasikan pada proses pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium/bengkel. *Ketiga*, adanya keterlibatan pihak DU/DI dalam proses penyusunan SK/KD mata pelajaran produktif.

Dunia usaha atau industri memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembelajaran, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan atau mensinkronkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada di silabus dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah siswa dalam menguasai kompetensi yang akan diperlukan ketika siswa melaksanakan praktik kerja di industri dan terlebih lagi untuk menyiapkan siswa dalam memasuki dunia kerja.

Menurut Pardjono (2011), SMK harus dikelola dengan mengacu pada tujuan utama, yaitu menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan bekerja. Manajemen SMK harus didisain untuk mencapai keefektifan dan sekaligus efisiensi. Merencanakan dan melaksanakan program sedekat mungkin dengan kondisi di tempat kerja merupakan tugas penting SMK. Kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja (*demand driven*). Peralatan dan bahan untuk praktik harus disediakan dengan kriteria

yang sama atau paling tidak mendekati kondisi di dunia kerja. Pembelajaran di SMK harus dilakukan sedemikian rupa sehingga lulusan SMK benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja, dalam arti siswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dunia kerja.

RPP merupakan program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan SK/KD yang terdapat dalam silabus pada Kurikulum Spektrum SMK. Guru diberikan cukup kewenangan untuk menganalisis SK/KD sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolah, serta kemampuan guru dalam menjabarkannya menjadi RPP yang siap dijadikan sebagai pedoman pembentukan kompetensi peserta didik.

Hasil temuan ini sejalan dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses yang menyatakan bahwa RPP merupakan penjabaran dari silabus yang berfungsi untuk memberikan arahan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap tenaga pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Implementasi Kurikulum Spektrum SMK pada Pelaksanaan Pembelajaran Produktif

Berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menyebutkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

Pelaksanaan pembelajaran pada kedua situs penelitian di SMK Lombok Timur, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pembelajaran produktif, telah diatur se-

demikian rupa untuk memudahkan guru dalam proses belajar mengajar dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, diantaranya: (1) persentase materi SK/KD mata pelajaran produktif setiap semester disesuaikan kondisi masing-masing sekolah dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti kondisi siswa, peralatan dan bahan praktik, tenaga pendidik dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan karakteristik Kurikulum Spektrum seperti yang diungkapkan Sanjaya (2012: 130), bahwa dalam pengembangan kurikulum diberikan (1) kebebasan, kemerdekaan dan keleluasaan tenaga pendidik dan pengelola pendidikan di daerah, serta memberikan peluang kepada mereka untuk berimprovisasi, berinovasi, dan berkreasi; (2) terbukanya kesempatan dan peluang bagi daerah, pengelola pendidikan dan tenaga kependidikan untuk melakukan berbagai adaptasi, modifikasi dan kontekstualisasi kurikulum sesuai dengan kenyataan di lapangan, baik kenyataan demografis, geografis, sosiologis, kultural maupun psikologi peserta didik; dan (3) terbukanya kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan kemandirian demi peningkatan mutu sekolah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pelaksanaan pembelajaran di DU/DI atau yang lebih dikenal dengan nama Praktik Kerja Industri (Prakerin). Model kerjasama antara SMK dengan DU/DI hingga saat ini masih dikenal sebagai bentuk penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) atau *dual system*, yakni pendidikan yang dilaksanakan dengan mengacu pada dua perspektif yaitu sekolah dan dunia usaha/industri. Sonhadji (2012: 165), menyatakan PSG merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan, memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan dunia kerja.

Dalam pelaksanaan saat ini, kerjasama SMK dengan DU/DI lebih dikenal

dalam bentuk Prakerin bagi siswa SMK. Artinya, implementasi kerjasama SMK dengan DU/DI hingga saat ini lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk Prakerin. Menurut Dikmenjur dalam Sonhadji (2012: 165), ada empat pola yang dapat dilaksanakan dalam strategi *link and match* melalui Prakerin, yakni *days release*, *blocks release*, *hour release* atau kombinasi dari ketiganya. Pelaksanaan pembelajaran produktif pada kedua situs penelitian mengungkapkan bahwa pada Kelas XII Semester Ganjil, setiap peserta didik diwajibkan mengerjakan tugas akhir berupa *project work*. Tugas akhir ini diberikan untuk mengukur dan menilai peserta didik terutama dari segi pengetahuan dan keterampilan (*skill*) di bidang teknik komputer sesuai dengan kompetensi masing-masing. *Project work* mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat atau menyelesaikan suatu produk (barang atau jasa), melalui proses produksi/pekerjaan yang sesungguhnya (BSNP) Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007).

Penelitian lainnya yang terkait dengan pengembangan *project work* sebagai sistem evaluasi di SMK dapat dilihat pada penelitian Syamsuningtyas (2009). Penelitian ini menyatakan bahwa *project work* lebih tepat digunakan sebagai sistem evaluasi produktif untuk program keahlian elektronika dan mampu meningkatkan hasil kerja siswa. Sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kerjasama dengan dunia industri dibutuhkan agar evaluasi produktif dengan metode *project work* ini lebih efektif.

Implementasi Kurikulum Spektrum SMK pada Penilaian Pembelajaran Produktif

Penilaian yang dilakukan pada mata pelajaran produktif memiliki ciri: (1) penilaian tertulis, lisan dan praktik (proyek, produk maupun unjuk kerja); (2) penilai-

an dilaksanakan pada setiap akhir standar kompetensi; (3) kriteria siswa dikatakan kompeten atau lulus apabila memenuhi nilai minimal sama dengan 7,00; dan (4) bentuk penilaian berupa ulangan harian, tengah semester, akhir semester dan kenaikan kelas.

Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menyatakan penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat menggunakan menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes (tertulis, lisan, dan praktik atau kinerja), observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Bentuk ulangan berupa ulangan harian, tengah semester, akhir semester, dan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan pada Implementasi Kurikulum Spektrum SMK

Pelaksanaan implementasi Kurikulum Spektrum pada dua SMK di Kabupaten Lombok Timur tidak lepas dari beberapa hambatan atau kendala. Dari hasil penelitian yang dilakukan, hambatan yang paling menonjol ada dua faktor yaitu kualitas tenaga pendidik dan pengadaan sarana prasarana. Dari faktor kualitas tenaga pendidik, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada dan masih minimnya jumlah tenaga pendidik yang berstatus guru tetap/PNS. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang menyatakan bahwa guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dari program studi yang se-

suai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Hasil penelitian pada kedua situs, untuk mengatasi hambatan dari aspek terbatasnya tenaga pendidik yang berkualifikasi sarjana pendidikan komputer, adalah (1) mengusulkan secara berkala dan terus menerus kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten untuk merekrut tenaga pendidik (guru) kejuruan melalui jalur penerimaan CPNS, dan (2) mengangkat tenaga pendidik (guru) honorer oleh pihak sekolah sesuai dengan kualifikasi pendidikan akademik yang dibutuhkan.

Kendala lainnya adalah terjadinya inkonsistensi tenaga pendidik (guru) dalam penyelesaian perangkat atau administrasi pembelajaran. Jumlah tenaga pendidik yang tidak mencukupi menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini dilakukan, rekrutmen pengajar tidak tetap (honorer) meskipun pengajar tidak tetap tersebut telah mengajar di beberapa tempat yang lain. Hal ini tentu saja berpengaruh pada inkonsistensi guru dari segi waktu dalam menyelesaikan perangkat pembelajaran. Inkonsistensi ini terjadi karena guru tidak tetap tersebut harus membagi waktu dengan beberapa sekolah. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran di kelas.

Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan dari segi inkonsistensi waktu pembuatan administrasi pembelajaran yaitu dengan mengadakan kegiatan bimbingan teknis atau *workshop* secara rutin dan berkala setiap enam bulan sekali atau setiap menjelang awal semester baru.

Faktor sarana dan prasarana baik laboratorium, bengkel, peralatan dan bahan praktik sangat penting sekali ketika aktivitas belajar mengajar praktik dilaksanakan. Sarana dan prasarana praktik yang

menguntungkan dan memenuhi syarat akan mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran praktik. Ruang praktik yang tidak memenuhi syarat kondisinya akan menghambat tercapainya kompetensi yang diinginkan (Slamet, 2009).

Dari hasil penelitian pada kedua situs diperoleh data bahwa terdapat kendala implementasi kurikulum spektrum dari aspek terbatasnya pengadaan sarana prasarana praktik. Bila dibandingkan dengan jumlah siswa dan rombongan belajar yang setiap tahun semakin meningkat, pengadaan sarana prasarana terutama untuk kebutuhan praktik siswa baik berupa ruang laboratorium/bengkel, peralatan dan bahan-bahan praktik tidak mengalami peningkatan dan bahkan kurang. Keadaan sarana prasarana yang terbatas ini tentu saja akan berdampak pada kualitas dan kuantitas kegiatan pada pembelajaran praktik.

Pengaruh pengadaan sarana prasarana terhadap proses pembelajaran siswa juga dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Tukiman (2009) yang menyatakan bahwa jumlah peralatan praktik sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran praktik. Jumlah peralatan praktik yang memadai dapat menjamin terseleskannya praktik dengan lebih leluasa, sehingga siswa memiliki lebih banyak pengalaman. Demikian juga dengan hasil penelitian Fauziati (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kondisi sarana terhadap pencapaian hasil belajar. Hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila sarana mempunyai nilai tinggi maka hasil belajar akan tinggi pula. Pendapat yang sama dinyatakan dalam hasil penelitian Cahyono (2005), yang menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara peralatan dan sarana belajar dengan prestasi belajar yang dicapai siswa. Peralatan dan sarana belajar yang

lengkap dan memadai akan meningkatkan prestasi belajar siswanya.

Untuk mengatasi hambatan keterbatasan sarana prasarana ini, maka upaya yang dilakukan pihak sekolah antara lain: (1) mengefektifkan penggunaan sumber dana yang masuk ke sekolah, baik bersumber dari komite sekolah maupun dari pemerintah pusat/daerah; (2) menerapkan skala prioritas dalam pengadaan sarana prasarana sesuai dengan tingkat kebutuhan; dan (3) menjalin kerjasama dengan DU/DI untuk pengadaan sarana prasarana praktik siswa, disamping secara rutin mengirimkan proposal ke pemerintah pusat/daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Implementasi Kurikulum Spektrum pada perencanaan pembelajaran meliputi: (1) pembentukan tim pengembang atau pokja kurikulum oleh kepala sekolah, (2) penyusunan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran produktif yang terdapat pada silabus di tingkat MGMP dan satuan pendidikan (sekolah), (3) melibatkan pihak dunia usaha/industri dalam memberikan masukan pada proses penyusunan SK/KD mata pelajaran produktif, (4) penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran lainnya oleh tenaga pendidik secara berkala dan kontinyu. Pelaksanaan pembelajaran produktif dilakukan bentuk: (1) pengaturan persentase SK/KD mata pelajaran produktif setiap semester disesuaikan kondisi masing-masing sekolah; (2) dilaksanakannya pembelajaran produktif di DU/DI; dan (3) pemberian tugas akhir berupa *project work*; Penilaian peserta didik dalam pembelajaran produktif berupa: (1) penilaian tertulis, lisan dan praktik (proyek, produk maupun unjuk kerja); (2) penilaian dilaksanakan pada setiap

akhir standar kompetensi; (3) kriteria siswa dikatakan kompeten atau lulus apabila memenuhi nilai minimal sama dengan 7,00; dan (4) bentuk penilaian terhadap siswa berupa ulangan harian, tengah semester, akhir semester dan kenaikan kelas. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Spektrum diantaranya adalah: (1) masih terbatas atau minimnya jumlah guru tetap/PNS yang berkualifikasi sarjana pendidikan komputer; (2) inkonsistensi guru dari segi waktu penyelesaian perangkat pembelajaran; (3) masih terbatasnya pengadaan sarana prasarana praktik peserta didik. Upaya untuk mengatasi hambatan pada implementasi kurikulum spektrum diantaranya adalah: (1) pihak sekolah supaya mengusulkan secara berkala dan terus menerus kepada pihak pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten untuk mengangkat tenaga pendidik (guru) kejuruan teknik komputer melalui jalur penerimaan CPNS; (2) mengangkat tenaga pendidik (guru) honorer oleh pihak sekolah sesuai dengan kualifikasi pendidikan akademik yang dibutuhkan; (3) mengadakan kegiatan bimbingan teknis atau *workshop* secara rutin dan berkala untuk mengurangi inkonsistensi tenaga pendidik dalam menyelesaikan perangkat pembelajaran; (4) mengefektifkan penggunaan sumber dana yang masuk ke sekolah, baik bersumber dari komite sekolah maupun dari pemerintah pusat/daerah serta menerapkan skala prioritas dalam pengadaan sarana prasarana sesuai dengan tingkat kebutuhan; dan (5) menjalin kerjasama dengan dunia usaha/industri untuk pengadaan sarana prasarana praktik siswa, disamping secara rutin mengirimkan proposal ke pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut: (1) kepala sekolah hendaknya proaktif untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui pihak dinas pen-

didikan untuk mengangkat tenaga pendidik yang berkualifikasi sarjana pendidikan komputer dan meningkatkan alokasi dana bantuan pengadaan sarana prasarana; (2) pemerintah daerah hendaknya memperhatikan kekurangan tenaga pendidik kejuruan dengan menambah kuota penerimaan tenaga pendidik pada penerimaan CPNS; dan (3) guru mata pelajaran produktif hendaknya senantiasa membiasakan diri untuk mengatur dan mengelola waktu untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran yang akan digunakan pada semester berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 2007. *Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta.
- Cahyono, E. 2005. *Sumbangan Efektif Sarana Prasarana dan Pengelolaan Kelas terhadap Prestasi Belajar*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPs UM.
- Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Kep. No. 251/C/Kep/Mn/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (Spektrum SMK). Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Fauziati, N.W. 2009. *Hubungan Kondisi Sarana Prasarana Laboratorium dengan Pencapaian Hasil Belajar pada Mata Diklat Sewing di SMKN 5 Malang*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Mendikbud. 1990. Kepmendikbud No. 0490/U/1990 tentang Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Mendikbud.
- Mendiknas RI. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: Mendiknas.
- Mendiknas. 2007. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Mendiknas.

- Mendiknas. 2007. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Jakarta: Mendiknas.
- Pardjono. 2011. *Peran Indsutri dalam Pengembangan SMK*. Makalah disajikan dalam workshop Peran Industri dalam Pengembangan SMK, SMKN 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta, 19 Februari 2011. (Online), (<http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/prof-drs-pardjono-m-sc-phd/peran-dudi-utk-smk.docx>, diakses 18 Oktober 2013).
- Presiden RI. 1990. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Jakarta: Presiden RI.
- Presiden RI. 2003. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Sanjaya, W. 2012. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Slameto. 2009. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sonhadji, A. 2012. *Manusia, Teknologi dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*. Malang: UM Pres.
- Susilo, M.J. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Syamsuningtyas, E.B. 2009. *Pengembangan Project Work sebagai Sistem Evaluasi Produktif di SMK Program Keahlian Elektronika di Kota Blitar*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPs UM.
- Tukiman. 2009. *Situasi Bengkel dan Kondisi Peralatan Praktik Pemesinan SMK Swasta di Wilayah Gerbangkertosusila*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPs UM.